

BAB II

KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Definisi Pengangguran

Sebutan pengangguran adalah sebuah istilah bagi individu yang belum memperoleh pekerjaan tersebut. Individu disebut pengangguran ketika ia tidak bekerja, namun individu yang secara sukarela tidak bekerja dikarenakan alasan lain maka tidak dikatakan pengangguran (Sukirno, 1994).

Pengangguran adalah sebuah problematika ekonomi makro, secara langsung menjadi beban yang berat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kebanyakan orang atau masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan akan mengalami degradasi standar hidup serta psikologis yang tertekan. Di samping itu, pengangguran juga seringkali terjadi karena ketidakcocokan kemampuan dengan kesempatan kerja yang tersedia (Mankiw, 2000).

Definisi lain tentang pengangguran ialah seseorang yang secara aktif mencari lowongan pekerjaan karena mereka tidak memiliki pekerjaan, atau bisa juga disebutkan bahwa seseorang yang sudah diterima untuk bekerja namun belum mulai bekerja. Selain itu, tergolong pengangguran ialah seseorang yang

sema sekali tidak bekerja selama lebih dari dua hari atau seminggu serta berusaha untuk mendapatkan kerja (-, Badan Pusat Statistik, 2020).

2.1.1.1 Jenis Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Penyebab terjadinya pengangguran dikelompokkan menjadi 4 kelompok (Sukirno, 1994):

1. Pengangguran Friksional

Pengangguran jenis ini ialah seseorang yang menganggur untuk sementara waktu karena adanya permasalahan atau terkendala oleh waktu, kondisi geografis, informasi yang tersedia antara ia dengan perusahaan yang menyediakan lapangan kerja. Suatu daerah yang memiliki kualitas ekonomi yang baik, akan mendorong sebuah lapangan pekerjaan untuk mendapatkan kualitas sumber daya yang baik pula. Contoh dari pengangguran jenis ini adalah seorang petani yang sementara menganggur karena ada perubahan sektor ekonomi dari pertanian menjadi industri. Bisa juga seorang individu yang sementara berhenti dari pekerjaannya, untuk pindah mencari pekerjaan yang baru.

2. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklis atau konjungtur adalah pengangguran yang terjadi akibat dari adanya perubahan yang terjadi pada kegiatan ekonomi. Perusahaan harus mengurangi jam kerja ketika terjadi degradasi pada kegiatan ekonominya. Sehingga kondisi pengurangan tersebut menyebabkan terjadinya angka pengangguran baru, atau individu terpaksa harus menganggur karena adanya pengurangan jam kerja.

3. Pengangguran Struktural

Jenis ini disebabkan karena adanya struktur ekonomi yang mengalami perubahan dalam jangka panjang. Misalnya seperti suatu daerah yang semula memiliki corak ekonomi pertanian, dipaksa berubah menjadi pusat industri sehingga menyebabkan penduduk tersebut harus berhenti bekerja sebagai petani secara permanen. Pengangguran jenis ini bisa juga disebabkan oleh kemungkinan lain seperti adanya penurunan jumlah permintaan terhadap suatu komoditas dikarenakan adanya kemajuan teknologi atau pemerintah yang mengeluarkan kebijakan baru.

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran jenis ini ialah individu yang tidak bekerja disebabkan oleh kehadiran teknologi yang mengganti kerja manusia. Misalnya penggunaan mesin penggilingan padi yang semula manual ditumbuh oleh tenaga manusia, sehingga menyebabkan pekerja penumbuk padi tersebut harus berhenti dari pekerjaannya karena digantikan oleh teknologi yakni mesin.

2.1.1.2 Teori Pengangguran

1. Teori Klasik

Teori ini menjelaskan tentang pengangguran yang dapat dicegah melewati sisi penawaran dan mekanisme harga yang berada di pasar bebas agar dapat menjamin adanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Artinya, pengangguran ini bisa terjadi karena adanya mis-alokasi dari sumber daya yang bersifat sementara dan kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004).

Teori Klasik ini jika terjadi nya kelebihan dalam penawaran tenaga kerja maka upah akan turun karena hal tersebut bisa mengakibatkan produksi perusahaan akan menjadi turun. Maka permintaan tenaga kerja ini akan semakin meningkat karena perusahaan bisa melakukan perluasan produksi karena adanya keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya produksi. Maka peningkatan tenaga kerja yang kemudian akan mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang berada di pasar, yang apabila harga menjadi relatif stabil (Tohar, 2000).

2. Teori Keynes

Teori Keynes dalam menanggapi masalah pengangguran ini sangat berlawanan dengan Teori Klasik, karena menurut Teori Keynes masalah pengangguran ini bisa terjadi karena adanya permintaan agregat yang cukup rendah. Yang kemudian bisa menghambatnya pertumbuhan ekonomi meskipun itu bukan disebabkan oleh rendahnya produksi melainkan rendahnya konsumsi. Jadi, ketika tenaga kerja ini meningkat maka upah akan menjadi turun yang dapat merugikan dan bukan menguntungkan, karena dengan terjadinya penurunan upah maka akan menurunkan daya beli dari masyarakat terhadap barang-barang. Kemudian produsen akan mendapatkan kerugian dan juga tidak dapat menyerap tenaga kerja.

3. Teori Malthus

Teori ini menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk yang cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Malthus mengatakan bahwa penduduk cenderung tumbuh secara “ deret ukur”, akan tetapi persediaan makanan cenderung tumbuh secara “ deret hitung “.

Artinya, penduduk cenderung tumbuh secara tak terbatas sehingga mencapai batas persediaan makanan, dan ini akan menimbulkan manusia saling bersaing untuk menjamin kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan adanya persaingan ini maka sebagian manusia tidak akan memperoleh bahan makanan. Artinya, semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak juga, tetapi hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada, karena jumlah kesempatan yang sedikit maka manusia akan saling bersaing untuk memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut akan menjadi golongan pengangguran.

2.1.1.3 Pengangguran Berdasarkan ciri-cirinya :

Pengangguran dibedakan menjadi empat kelompok jika dilihat dari ciri-cirinya, sebagai berikut (Sukirno, 1994):

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka dapat terjadi ketika adanya ketimpangan antara jumlah pelamar kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Sehingga banyak angka usia kerja yang terus meningkat dan tidak mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terhambat karena sedikit sekali angka usia kerja yang melakukan kegiatan produktif. Disebut pengangguran terbuka karena individu yang menagnggur tersebut secara nyata dan terang-terangan tidak melakukan pekerjaan apapun. Hal tersebut tentu saja disebabkan oleh banyak faktor di antaranya adalah seperti penurunan kualitas kegiatan ekonomi, serta teknologi yang mengalami kemajuan namun tidak ditopang oleh meningkatnya lowongan kerja.

2. Pengangguran Tersembunyi

Seseorang yang menganggur secara tidak sukarela karena disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dicegah atau dihindari seperti yang kerap terjadi pada ekonomi sektor pertanian dan jasa. Sebuah perusahaan biasanya selalu membutuhkan tenaga kerja dalam operasionalisasi perusahaannya, akan tetapi apabila terlalu banyak tenaga kerja yang digunakan akan menyebabkan operasional perusahaan tidak efisien sehingga banyak tenaga kerja atau karyawan yang tidak melaksanakan tugas apa-apa sebab sudah dikerjakan oleh karyawan lain. Contoh dari seseorang yang disebut sebagai pengangguran tersembunyi adalah banyaknya jumlah pelayan pada sebuah restoran sementara restoran tersebut tidak terlalu membutuhkan pelayan yang terlalu banyak.

3. Pengangguran Musiman

Seseorang yang menganggur dikarenakan terjadinya perubahan musim tertentu disebut sebagai pengangguran musiman. Artinya, pada musim tertentu mereka tidak menganggur, akan tetapi ketika terjadi perubahan musim lain mereka akan kembali menganggur. Pengangguran musiman seringkali terjadi pada penduduk pedesaan yang mata pencahariannya bertumpu pada alam seperti pertanian, berkebun, atau nelayan yang mengelola ikan. Misalnya bagi individu yang bekerja sehari-hari berkebun, mereka akan bekerja ketika sudah musim buah-buahan tiba dan kemudian menjualkan kembali hasil panennya. Sementara apabila masa musim sudah selesai mereka tidak bekerja karena tidak ada hasil kebun yang harus dijual kembali.

4. Setengah Menganggur

Penduduk yang bermigrasi dari desa ke kota kerap terjadi pada negara yang masih berada dalam fase berkembang. Hal tersebut bisa dikarenakan penduduk desa merasa bahwa kota memiliki banyak sekali mata pencaharian. Namun pada kenyataannya, tidak semua penduduk desa yang pindah ke kota bisa segera mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang telah diharapkan. Sebagian lagi ada yang bekerja paruh waktu atau tidak sepenuhnya bekerja. Individu yang memiliki pekerjaan paruh waktu tersebut tidak sepenuhnya bekerja, atau bekerja serabutan sehingga disebut sebagai setengah menganggur.

2.1.1.4 Menghitung Tingkat Pengangguran Terbuka

Suatu wilayah kerap memiliki masalah ekonomi berupa pengangguran, untuk mengetahui angka pengangguran tersebut maka dapat diukur dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour Force Approach*)

Angka pengangguran dapat diukur dengan menggunakan formulasi jumlah penduduk yang tidak bekerja dibagi dengan jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

2. Pendekatan Pemanfaatan Tenaga Kerja (*Labour Utilization Approach*)

- a. Bekerja penuh waktu (*“employed”*) ialah individu yang sudah secara penuh bekerja dengan jam kerja 35 jam/minggu.

- b. Setengah menganggur (“*underemployed*”) ialah individu yang tidak memiliki jam kerja penuh waktu atau kurang dari 35 jam/minggu.

2.1.1.5 Akibat Buruknya Pengangguran

Pengangguran dapat berakibat buruk pada beberapa aspek, di antaranya adalah sebagai berikut (Sukirno, 2000).

1. Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tingginya angka pengangguran akan mengakibatkan masyarakat untuk sulit bertumbuh terutama dalam menopang keadaan ekonomi keluarganya. Sehingga dapat disebutkan hal-hal berikut ini yang mungkin saja timbul akibat tingginya angka pengangguran:

- a. Kemakmuran akan semakin sulit dicapai sebab terbatasnya tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat karena tidak memiliki pekerjaan.
- b. Pemerintah akan mendapatkan pajak yang rendah sebab sedikit sekali masyarakat yang memenuhi kriteria wajib pajak.
- c. Pertumbuhan ekonomi akan semakin terhambat sebab tingginya angka pengangguran.

2. Akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat

Kehidupan sosial tempa individu menjalani kegiatan sehar-hari akan memiliki banyak hambatan diakibatkan tingginya angka pengangguran. Hambatan atau akibat buruk dari tingginya angka pengangguran dalam kehidupan sosial individu dapat dirumuskan dalam poin-poin berikut ini:

- a. Masyarakat kehilangan sumber pendapatan akibat fenomena pengangguran.

- b. Individu yang lama tidak terbiasa melakukan sebuah pekerjaan akan kehilangan keterampilannya karena sudah lama tidak terlatih untuk bekerja.
- c. Sosial dan politik akan cenderung tidak stabil pada sebuah negara akibat dari lesunya ekonomi karena mayoritas masyarakatnya adalah pengangguran.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian yang terus mengalami perkembangan serta memiliki tingkat produktivitas yang tinggi maka diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Kemampuan masyarakat yang mengalami peningkatan sebab didorong oleh beragam faktor produksi yang akan cenderung terus menerus menyebabkan peningkatan kualitas tersebut. Dengan begitu, indikasi dari aspek investasi akan mendorong pertambahan jumlah barang modal. Perkembangan terus terjadi dari segi teknologi yang kemudian tenaga kerja akan mengalami peningkatan dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat, namun keterampilan angkatan kerja tersebut sudah memenuhi kualitas yang semestinya (Sukirno, 2008).

Tingkat ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang dicapai oleh suatu Negara atau Wilayah dihitung dari pendapatan nasional riil, yaitu Produk Nasional Bruto riil (PNB) atau Produk Domestik Bruto riil. Perhitungan pendapatan nasional secara ini memungkinkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara langsung dihitung dari pendapatan riil yang tersedia. Formula yang akan digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu :

$$g_t = \frac{PN_{Rt} - PN_{R(t-1)}}{PN_{R(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana :

- g : Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen.
- PN_R : Pendapatan nasional riil berdasarkan harga konstan.
- PN_{Rt} : Pendapatan nasional riil untuk tahun dimana tingkat pertumbuhan ekonominya dihitung.
- PN_{Rt-1} : Pendapatan nasional tahun sebelumnya.

Di Indonesia pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) riil untuk tingkat nasional, dan Produk Domestik Regional Bruta (PDRB) riil untuk tingkat daerah.

2.1.2.1 Ciri-Ciri Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat beberapa hal yang bisa dikatakan bagi sebuah perekonomian mengalami pertumbuhan, ke enam ciri yang dikemukakan oleh (Sukirno, 1994):

1. Penduduk mengalami pertumbuhan yang relatif cepat dibarengi dengan angka pendapatan perkapita yang relatif tinggi.
2. Produktivitas mengalami peningkatan dengan indikator peningkatan perkapita
3. Perubahan struktural ekonomi yang signifikan dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian.
4. Urbanisasi masyarakat mengalami peningkatan
5. Negara lain mudah melakukan ekspansi bisnis ke negara tersebut
6. Arus barang dan faktor produksi lainnya mengalami peningkatan

2.1.2.2 Proses Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses bertumbuhnya sebuah perekonomian, di antaranya adalah dari faktor ekonomi itu sendiri dan

faktor dari luar aspek ekonomi. Di samping itu, sudah pasti sebuah pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kualitas sumber daya yang ada pada suatu negara seperti alam, manusia, usaha, teknologi, modal dan lainnya.

1. Faktor Ekonomi

Faktor produksi dianggap sebagai elemen penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah berikut ini:

a. Sumber Alam

Alam merupakan kekayaan yang hadir secara naluriah yang dimiliki oleh sebuah negara. Sehingga sumber daya alam dapat menjadi penopang bagi sebuah negara dalam mengupayakan perbaikan kondisi perekonomiannya.

b. Akumulasi Modal

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang menjadi penyebab keberlangsungan sebuah kegiatan ekonomi. Pembentukan modal memerlukan pengorbanan dengan mengurangi konsumsi yang bisa jadi dapat berlangsung lama. Dengan demikian, pembentukan investasi dan modal menjadi bagian terpenting dalam upaya memajukan aspek ekonomi.

c. Organisasi

Seperti anggota tubuh yang saling membutuhkan wadah untuk berjalan sesuai fungsinya, organisasi merupakan elemen terpenting dalam menopang keberlangsungan ekonomi. Tanpa sebuah organisasi atau yang kerap disebut dengan perusahaan, maka sebuah kegiatan perekonomian akan terhambat produktivitasnya dan kehilangan wadah untuk memproduksi.

d. Kemajuan Teknologi

Teknologi dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan segala aspek. Sehingga dalam aspek ekonomi, perkembangan teknologi tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memudahkan proses produksi sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

e. **Pembagian Kerja dan Skala Produksi**

Setiap individu memiliki skill dan kompetensi yang tidak serupa, sehingga tidak mungkin segala bentuk pekerjaan yang berbeda-beda pula disamaratakan dapat dikelola oleh setiap individu. Untuk mengurangi ketidakefisienan proses dan hasil kerja, maka diperlukan spesialisasi kerja bagi masing-masing karyawan.

2. Faktor Non-Ekonomi

Tidak hanya dari faktor ekonomi, beberapa hal yang tidak termasuk ke dalam aspek ekonomi namun juga mampu mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi.

Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. **Faktor Sosial**

Sosial dan budaya dapat menjadi faktor pendukung sebuah perekonomian. Hal tersebut dikarenakan sosial dan budaya akan membentuk pandangan, struktur sosial, serta harapan yang dimiliki oleh masing-masing individu atau masyarakat.

b. **Faktor Ekonomi**

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor-faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi.

c. Faktor Politik dan Administratif

Kondisi politik dan administratif sebuah negara menjadi penentu penghambat atau tidaknya proses pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Klasik

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Adam Smith

Adam Smith merupakan tokoh klasik yang sering membahas soal teori ekonomi salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pada buku yang di tulis oleh Adam Smith *An Inquiry Into The Nature And Causes Wealth Of Nation* (1776), Adam Smith menjelaskan mengenai bagaimana melakukan analisis pertumbuhan ekonomi berdasarkan dua faktor, yakni faktor aktor dan faktor pertumbuhan penduduk.

Faktor aktor dilakukan dengan tiga variabel yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal cadangan atau capital untuk perhitungan total output. Sedangkan faktor pertumbuhan penduduk digunakan untuk menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut David Richardo

Teori David Ricardo mengenai ekonomi yang paling terkenal adalah tentang *The Law Of Diminishing Return*. Pandangan mengenai kenaikan jumlah penduduk yang mampu mengubah penurunan margin produk karena keterbatasan luas tanah.

Berdasarkan pandanngannya, menaikkan produktivitas perlu peningkatan teknologi dan jumlah modal yang besar, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

2. Teori Neo Klasik

Dalam Teori ini, ada dua tokoh paling populer yaitu Joseph A. Schumpeter dan Robert Solow.

a. Pertumbuhan Ekonomi menurut Joseph A. Schumpeter

Pandangan dari Joseph A. Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *The Theory of Economic Development*, mengacu pada pengusaha berperan dalam hal pembangunan. Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dikarenakan ide-ide baru dari para pebisnis.

b. Pertumbuhan Ekonomi menurut Robert Solow.

Robert Solow menjelaskan pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh empat faktor yaitu, yakni manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output).

3. Teori Neo Keynes

Menurut ahli ekonomi yaitu Roy F. Harrod dan Evsey D Domar. mereka berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ini dapat dipengaruhi oleh modal, permintaan dan investasi. Ketiganya sangat berperan penting untuk meningkatkan produksi nasional pada suatu negara yang bisa mempengaruhi peningkatan di negara tersebut.

Dalam teori ini juga menyoroti bagaimana pentingnya kegiatan investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Karna yang akan menunjang

pertumbuhan ekonomi itu ialah investasi. Teori Neo Keynes ini berpandangan investasi tanam modal ialah komponen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan produksi nasional baik dalam skala kecil ataupun besar.

2.1.3 Upah

2.1.3.1 Pengertian Upah

Upah tidak terlepas dari hubungannya dengan tenaga kerja. Pasar Tenaga kerja, sama halnya dengan pasar-pasar lainnya dalam perekonomian diatur oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah. Upah merupakan salah satu rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan dorongan utama, tingkat upah hanya merupakan dorongan hingga tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para karyawan sepantasnya (Mankiw, 2003).

Undang-undang mendefinisikan upah merupakan “hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang akan dilakukan.”

2.1.3.2 Jenis-Jenis Upah

Terdapat beragam upah menurut hukum ketenagakerjaan" di antaranya adalah seperti berikut ini (Asyhadie, 2007):

1. Upah Minimal

Upah atau bayaran yang diterima oleh pekerja karena tenaga yang sudah dicurakkannya atas suatu pekerjaan tertentu.

2. Upah Nyata

Imbalan berbentuk uang riil yang diterima pekerja sebagai bagian dari haknya atas kewajiban yan sudah ditunaikan.

3. Upah Hidup

Imbalan yang bersifat menyeluruh sehingga bisa menghidupi si pekerja yang didapatkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar melainkan juga kebutuhan keluarga pekerja beserta dengan kebutuhan tambahan lainnya. yakni pekerja mendapatkan upah tambahan seperti asuransi biaya pendidikan anak.

4. Upah Minimum

Imbalan standar yang diterima oleh pekerja karena telah ditetapkan oleh pemerintah. Upah minimim ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk kebijakan dalam menjaga kestabilan ekonomi .

2.1.3.3 Teori-Teori Upah

(Malayu, 2002) menjelaskan bahwa ada beberapa teori mengenai upah yaitu sebagai berikut :

1. Teori Upah Dana Alam, teori ini dipelopori oleh David Ricardo, yang menjelaskan bahwa :
 - a. Upah menurut kodratnya adalah upah yang dimana cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dan keluarganya.
 - b. Sedangkan upah menurut harga pasar yaitu upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Oleh ahli-ahli ekonomi modern upah kodrat yang dijadikan upah minimum dari upah.
2. Teori Upah Besi yang dikemukakan oleh *Ferdinand Lassalle* yang menyatakan bahwa :
 - a. Sistem pembagian keuntungan, sistem upah ini dapat disampaikan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan diakhir tahun.
 - b. Sistem upah indeks merupakan sistem yang didasarkan atas indeks biaya kebutuhan. Maka dengan menggunakannya sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan.
3. Teori Upah Etika
Menurut kaum yang memiliki idealis masyarakat yang ideal (Kaum Utopis) merupakan tindakan para pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai. Oleh karena itu sebaiknya para pengusaha selain dapat memberikan upah yang layak kepada pekerja dan keluarga, juga harus memberikan tunjangan keluarga.

4. Teori Upah Menurut Nilai dan Pertentangan Kelas

Menurut Pertambahan Produk Marginal, Teori Neo Klasik mengemukakan dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari pertambahan faktor produksi tersebut.

2.1.3.4 Dasar Hukum Upah Minimum

Sebagaimana yang ditentukan dalam “ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.78 Tahun 2015 “, Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah minimum ditentukan dalam “ Pasal 41-50 Undang-Undang No.78 Tahun 2015”. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat1-2 terdiri atas: Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Upah minimum sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas : Upah tanpa tunjangan Upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setiap tahun berdasarkan kehidupan layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk mendapatkan hidup layak

secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Komponen dan pelaksanaan tahap pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Pengusaha dilarang membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41.”

2.1.3.5 Penetapan Upah Minimum

Di Indonesia upaya diberlakukannya upah minimum didasarkan kepada kebutuhan atas kehidupan yang baik untuk setiap masyarakatnya. Penetapan upah minimum tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebagai pertimbangannya. Gubernur menetapkan UMK yang dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$UM_n = \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB)\}$$

Keterangan :

UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t : Upah minimum tahun berjalan

Inflasi : Inflasi yang dihitung dari inflasi September tahun lalu hingga September tahun berjalan

ΔPDB_t : Pertumbuhan PDB yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Semakin banyak pekerja yang dipekerjakan maka produktifitas pada setiap pekerja tambahan akan semakin sedikit, perilaku ini disebut penurunan produk marginal (*diminishing marginal product*). Pada permintaan tenaga kerja, tingkat upah dilihat dari nilai produk marginal. Nilai produk marginal merupakan produk marginal dari suatu input dikalikan dengan harga hasil produksi di pasar. Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut :

$$VMPL (\text{Upah}) = MPL \times P$$

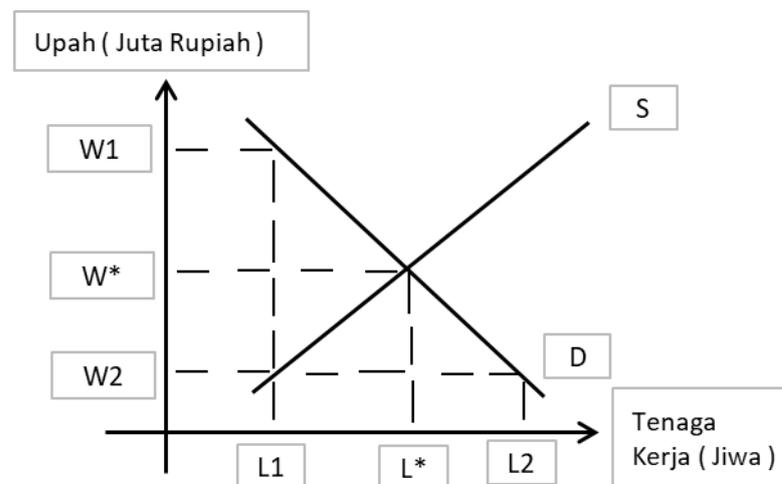
Keterangan :

VMPL = Nilai Produk Marginal

MPL = Marginal Produk Tenaga Kerja

P = Harga Produk.

Keseimbangan interaksi antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja ini sering disebut sebagai penyerapan tenaga kerja, dimana permintaan penawaran tenaga kerja secara bersama menentukan suatu keseimbangan tingkat upah dan keseimbangan penggunaan tenaga kerja (Wahyudi, 2004). Dimana keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kurva Penawaran Dan Permintaan Tenaga Kerja

Dari Gambar 2.1 mengenai penawaran dan permintaan tenaga kerja terlihat bahwa pada titik W^* merupakan simbol dari upah ekuilibrium (*equilibrium wage rate*), pada tingkat upah yang lebih tinggi W_1 , penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sehingga persaingan antar individu dalam merebut pekerjaan cenderung akan menurunkan tingkat upah menuju ke titik ekuilibrium, yakni W^* . Sebaliknya, pada tingkat upah yang lebih rendah titik W_2 , jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan akan melebihi jumlah penawaran yang ada sehingga akan terjadi persaingan antar perusahaan dalam merekrut tenaga kerja dan Upah (Rupiah) Tenaga Kerja (Jiwa) dan cenderung mendorong kenaikan tingkat upah menuju titik ekuilibrium, W^* .

Besarnya permintaan tenaga kerja oleh perusahaan tergantung pada besar kecilnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan (Simanjuntak, 1985).

Fungsi permintaan biasa didasarkan pada Teori Neo Klasik mengenai *Marginal Physical Product of Labor*, permintaan terhadap tenaga kerja berkurang apabila tingkat upah naik. Tingkat kesempatan kerja yang cenderung tinggi sebagai hasil dari kebijakan pembangunan yang dapat mengacu kepada kebijakankebijakan yang meliputi penentuan harga sebagian sumber daya tertentu yang akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja oleh industri.

2.1.3.6 Macam-Macam Upah Minimum

1. Upah Minimum Regional (UMR)

Standar yang digunakan oleh pengusaha dan industri untuk memayar karyawan sekretaris atau guru yang diterapkan dalam lingkungan bisnis atau pekerja. Pelaksanaan pengupahan UMR bertujuan untuk melindungi kepentingan pegawai untuk mendapatkan gaji yang sepadan dan sesuai dengan beban kerja..

2. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Provinsi dalam menetapkan UMKnya ditetapkan oleh gubernur. UMP ditentukan menggunakan formula perhitungan upah minimum regional atau UMR. Gubernur mempertimbangan rekomendasi dari dewan pengupahan dalam menentukan kebijakan upah minimum. Kendati demikian, dewan pengupahan pun memberikan rekomendasi dengan berdasar kepada hasil tinjauan terhadap kebutuhan hidup beserta komponen dan jenis yang telah ditetapkan oleh menteri atas dasar pertimbangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Upah minimum provinsi/pusat kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan. Gubernur menetapkan Upah Minimum Badan Kota dengan memperhatikan usulan Bupati/Walikota serta usulan dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. Rekomendasi Bupati/Walikota serta Rekomendasi dan Pertimbangan Remunerasi Badan/Kota.

2.1.4 Jumlah Penduduk

2.1.4.1 Pengertian Jumlah Penduduk

Istilah penduduk disebutkan kepada individu atau seluruh orang yang telah menetap dan memiliki domisili pada suatu wilayah yang terdaftar secara geografis di Indonesia dalam kurun waktu sekitar sama dengan atau lebih dari 6 bulan. (Herlambang, Sugiarto, & Kelana, 2001). Definisi lain mengenai penduduk ialah mereka yang telah secara resmi bertempat atau menetap dalam suatu wilayah. Namun demikian, konteks pembangunan terdapat dua pandangan mengenai penduduk. Ada yang berpandangan bahwa penduduk merupakan elemen pendukung pembangunan, namun ada pula yang berpandangan sebaliknya (Todaro, 2000).

Kualitas kependudukan adalah keadaan kependudukan yang dinilai dari aspek materil dan nonmateril meliputi tingkat produktivitas, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, tenaga kerja dengan kemandirian kerja alat standar dasar untuk pengembangan kapasitas manusia yang bertakwa berbudaya dan berbangsa dan hidup dengan cara yang erada yang layak untuk negara (Jhingan, 2013).

Pandangan yang menyatakan bahwa penduduk yang terus mengalami pertumbuhan sebagai sebuah hambatan bagi pembangunan, ialah apabila pertumbuhan penduduk tersebut tidak dibarengi dengan tingkat kualitas manusianya. Artinya, penduduk dalam suatu negara banyak namun tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Setiap tahun manusia aru lahir dan meningkatkan populasi dunia saat ini menjadi miliaran orang. Pertumbuhan penduduk yang segitu pesat menimbulkan banyak masalah bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Apabila upaya-upaya pembangunan yang telah dilakukan di masa mendatang dapat benar-benar berhasil maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk meningkatkan tingkat pendapatan secara umum kesehatan pendidikan dan kesejahteraan serta meningkatkan diri percaya sendiri.

2.1.4.2 Teori Jumlah Penduduk

1. Malthusian Dan Neo Malthusian

Menjelaskan bahwa adanya proses perkembangbiakan yang mengakibatkan adanya pertumbuhan penduduk dari segi jumlah. Meningkatnya jumlah penduduk ini tidak diikuti dengan ketersediaan bahan pangan yang ada. Yang mengakibatkan terjadinya defisit akibat ketidakseimbangan tersebut. Maka dari itu, teori ini menekankan bahwa dibutuhkan adanya pembatasan jumlah penduduk agar tidak ada peningkatan yang tidak terkontrol, dan untuk menghindari terjadinya peningkatan populasi. Untuk pembatasan jumlah penduduk dengan cara mengurangi angka kelahiran dengan cara memanfaatkan penundaan usia perkawinan.

2. Marxian oleh Karl Marx dan Friedrich Engels

Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya tekanan penduduk ini tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan pangan, tetapi pada jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Karena, semakin besarnya tekanan penduduk maka semakin kecil pula pertumbuhan ekonomi di wilayah karena banyaknya pengangguran yang ada. Kemudian teori ini juga menjelaskan bahwa diperlukan adanya perubahan besar yang signifikan dari masyarakat yang kapitalis menjadi sosialis. Pemanfaatan tenaga-tenaga yang ada di masyarakat juga semaksimal mungkin dapat meningkatkan angka produktivitas yang dapat memberikan kesempatan untuk masyarakat memperbaiki tingkat perekonomiannya. Hal ini yang menyebabkan masyarakat memiliki kesempatan dan ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kemampuan dalam produksinya.

3. Teori Mutakhir

Teori Mutakhir ini menjelaskan tentang adanya persaingan antar penduduk yang bersifat positif sebagai akibat dari kepadatan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Persaingan yang bersifat positif ini dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas, tingkat pendidikan dan oenurunan angka fertilitas, dan teori ini juga memandang bahwa penurunan angka fertilitas merupakan hasil dari peningkatan kecerdasan penduduk.

Berbeda dengan teori Malthus dan Marxian, teori ini telah memasukan pertimbangan kemajuan teknologi. Kemajuan ini di dapatkan dari peningkatan kecerdasan dan akan berimbas pada peningkatan produksi bahan pangan untuk

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kemajuan teknologi ini juga berimbas pada taraf peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

2.1.4.3 Pertumbuhan Penduduk

Aspek-aspek yang dapat menentukan angka pertumbuhan penduduk adalah tingginya angka kelahiran, migrasi masuk (imigrasi) dari negara luar, rendahnya angka kematian, serta migrasi keluar (Mantra, 2003).

Sementara itu, BPS menyatakan bahwa perhitungan pertumbuhan penduduk dapat diformulasikan seperti berikut ini:

$$r = \left(\frac{P_t}{P_o} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Dengan keterangan seperti berikut:

r : Tingkat laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah penduduk pada akhir periode

P_o : Jumlah penduduk awal periode

n : Jumlah tahun dalam periode tersebut

Dalam sebuah negara yang mengalami pertumbuhan penduduk dari segi kuantitas dapat terjadi jika angka bayi yang lahir tinggi sementara angka kematian orang tua rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya jumlah penduduk dari luar negeri yang melakukan imigrasi ke dalam negeri sementara yang bermigrasi keluar sedikit.

2.1.4.4 Persamaan Berimbang (*The Balance Equation*)

Dalam perhitungan mengenai pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, yakni dapat diformulasikan seperti berikut ini:

$$P_t = P_0 + (B - D) + (IM - OM)$$

Dimana:

“ P_t : Banyaknya penduduk pada tahun akhir

P_0 : Banyaknya penduduk pada tahun awal

B : Banyaknya kelahiran

D : Banyaknya kematian

IM : Banyaknya migrasi masuk

OM : Banyaknya migrasi keluar

$(B - D)$: Pertumbuhan penduduk alamiah”

2.1.4.5 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk

Ada beberapa pertumbuhan penduduk menurut (Jhingan, 2013) yaitu :

1. Penduduk Dan Pendapatan Perkapita

Hubungan antara banyaknya jumlah penduduk dengan angka pendapatan perkapita biasanya bertolak belakang. Hal tersebut karena banyaknya penduduk belum didukung oleh pendapatan perkapita yang memadai.

2. Penduduk Dan Standar Kehidupan

Pendapatan perkapita dapat menjadi indikator penting dalam menilai tingkat standar kehidupan sebuah negara. Sehingga segala sesuatu yang dapat

mendorong pendapatan berkapita akan berkaitan pula dengan pertumbuhan ekonomi.

3. Penduduk Dan Pembangunan Pertanian

Perekonomian negara berkembang bertumpu pada sektor pertanian. Sehingga masih banyak sekali pedesaan pada negara-negara yang masih berkembang dan warga negaranya dominan sebagai petani. Sehingga ketika penduduk semakin bertambah, maka lahan akan semakin banyak digunakan sebagai pemukiman. Dengan demikian lahan petani yang digunakan sebagai sumber penghasilan berpotensi menyusut seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

4. Penduduk dan Lapangan Kerja

Pertambahan jumlah penduduk berarti akan menimbulkan fenomena meningkatnya jumlah permintaan lapangan kerja. Namun, biasanya lapangan pekerja tidak bertumbuh secepat pertambahan penduduk. Sehingga pertambahan penduduk, akan menyebabkan degradasi ekonomi sebab meningkatnya jumlah pengangguran. Dikarenakan ketiadaan sumber pelengkap, tidaklah mungkin untuk mengembangkan lapangan pekerjaan.

Akibatnya tenaga buruh pengangguran dan kekurangan lapangan pekerjaan akan meningkat. Penduduk yang meningkat dengan cepat akan mengurangi pendapatan, tabungan dan investasi, karenanya pembentukan modal menjadi semakin lambat dan kesempatan kerja berkurang maka dengan begitu akan menimbulkan pengangguran.

2.1.5 Tenaga Kerja

2.1.5.1 Pengertian Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja menjelaskan bahwa tenaga kerja yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 merupakan tenaga kerja yang dimana setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Manulang, 2010).

Tenaga kerja sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut (Mulyadi, 2014).

(Murti, 2014) menjelaskan bahwa tenaga kerja yaitu individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

Artinya bahwa tenaga kerja ialah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan batas usia minimal angkatan kerja yaitu 15 tahun. Orang yang berumur 15 tahun atau tidak bekerja atau tidak mencari pekerjaan karena sekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau secara fisik dan mental tidak memungkinkan umur bekerja tidak dimasukan dalam angkatan kerja. Banyak sedikitnya angkatan kerja tergantung komposisi penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama

penduduk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak. Angkatan kerja yang banyak itu diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dalam konsep ketenagakerjaan, terdapat komponen lain yang masuk dalam kategori tenaga kerja antara lain angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor-force participation rate*) adalah persentase dari populasi orang dewasa yang ada dalam angkatan kerja. Istilah tenaga kerja (*man power*) adalah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut (Mulyadi,2006:60). TPAK dapat dihitung dengan rumus perhitungan angkatan kerja dibagi tenaga kerja dikali 100%.

Angkatan kerja (*labor force*) didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur, dan tingkat pengangguran (*unemployment rate*) didefinisikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa (Mulyadi, 2006:60). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan jumlah angkatan kerja yang bekerja. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa dalam struktur ketenagakerjaan terdapat angkatan kerja yang terdiri dari orang yang bekerja dan tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penelitian ini hanya mengambil meneliti tentang jumlah angkatan kerja

yang bekerja. Hal ini berkaitan dengan pendekatan angkatan kerja yang bekerja dinilai produktivitasnya untuk menghasilkan output bagi suatu kegiatan perekonomian. Ini berkaitan dengan pengaruhnya terhadap penanaman modal asing yang ada di wilayah tersebut.

2.1.5.2 Konsep Angkatan Kerja

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja 15 tahun meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun dan tanpa batas atas usia kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. Sedangkan bekerja dikatakan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan paling sedikit 1 jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misal karena cuti, sakit dan sejenisnya. Kriteria satu jam digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk didalamnya adalah pekerja dengan waktu singkat, pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerja yang tak beraturah lainnya.

Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan pengangguran yang digunakan, dimana pengangguran adalah situasi dari ketiadaan pekerja

secara total, sehingga jika batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi pengangguran yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total. Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan analisis antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi. Kriteria satu jam ini bisa berarti satu jam per minggu maupun satu jam per hari. Berikut diagram ketenagakerjaan menurut indikator pasara tenaga kerja, Badan Pusat Statistik.



Sumber: Indikator Pasar Tenaga Kerja, BPS

Gambar 2.2 Diagram Ketenagakerjaan

2.1.5.3 Jumlah Unit Usaha

Unit usaha adalah suatu badan yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan rumah tangga atau badan yang berwenang yang ditentukan berdasarkan wilayah geografis dimana unit tersebut beroperasi. Perusahaan atau unit usaha industri adalah suatu unit yang melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa di suatu lokasi tertentu mempunyai catatan administrasi yang berkaitan dengan barang dan jasa yang dihasilkan dan mempunyai satu atau lebih tanggung jawab perusahaan (-, Badan Pusat Statistik, 2020)

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 mengenai perindustrian, “industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi menjadi barang yang mempunyai nilai lebih tinggi bagi penggunaannya termasuk kegiatan perencanaan industri.”

Peran sektor industri sebagai lokomotif di sektor lain. Deklarasi ini mendorong perluasan kesempatan kerja yang ada dan akan meningkatkan pendapatan dan masyarakat. Dengan demikian pendapatan yang meningkat menunjukkan ekonomi yang berkembang dengan baik (Arsyad, 2010).

2.1.5.4 Klasifikasi Industri Berdasarkan Tenaga Kerja

Industri terdiri dari empat kelompok jika didasarkan pada jumlah tenaga kerja di dalamnya (Waluya, 2018) yaitu :

- a. Industri Rumah Tangga (tenaga kerja < 4 orang).
- b. Industri Kecil (tenaga kerja 5-19 orang).
- c. Industri Sedang (tenaga kerja 20-99 orang).
- d. Industri Besar (tenaga kerja >100 orang).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Perbedaan
1.	Monica Wulandari (2019) “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Antar Kabupaten/Kota Sumatera Barat“	Variabel Independen : Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi. Variabel Dependen : Tingkat Pengangguran	Hasil penelitiannya adalah “secara bersama-sama variabel tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran” antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.	Perbedaannya : Teknik analisis menggunakan regresi data panel Random Effect Model. Variabel bebas nya yaitu investasi dan pendidikan, waktu dan lokasi tempatnya berbeda. Persamaannya : Menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dan variabel yang sama pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.
2.	Jihad Lukis Panjawa & Daryono Soebagiyo (2014). “Efek Peningkatan Upah	Variabel Independen : Upah Minimum, PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi.	Hasil menunjukkan “PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran, upah minimum dan jumlah penduduk	Perbedaannya : Variabel bebas nya yaitu inflasi. Lokasi dan waktu penelitian objek dari penelitian berbeda.

	Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran “	Variabel Dependen : Tingkat Pengangguran	berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.”	Persamaannya : Menggunakan metode kuantitatif dan analisis data panel, variabel PDRB, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk dan Variabel terikat tingkat pengangguran.
3.	Ria Firdhania & Fivien Muslihatinningsih (2017). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jember”	Variabel Independen : Jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. Variabel Dependen : Tingkat Pengangguran	“Jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Variabel yang cenderung berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember adalah upah minimum.”	Perbedaannya : Variabel bebas nya inflasi dan indeks pembangunan manusia. Lokasi dan waktu penelitian objek dari penelitian berbeda. Persamaannya : Menggunakan metode kuantitatif dan analisis data panel, variabel PDR, Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Variabel terikat tingkat pengangguran.
4.	Siti Zilfiyah, Devanto Shasta Pratomo (2013). “ Analisis Kontribusi Sektor	Variabel Independen : PDRB Sektor Industri, Upah Minimum,	Dari hasil penelitian “diketahui bahwa variabel upah minimum dan	Perbedaannya : Variabel bebas menggunakan variabel PDRB sektor industri dan

	Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Indonesia “.	Jumlah Penduduk dan Pengangguran. Variabel Dependen : Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri.	jumlah penduduk berpengaruh signifikan, sedangkan PDRB sektor industri dan pengangguran tidak signifikan.”	pengangguran sedangkan variabel terikat nya penyerapan tenaga kerja sektor industri. Lokasi dan waktu penelitian objek dari penelitian berbeda. Persamaannya : Memakai metode kuantitatif dan analisis data panel, variabel Upah Minimum dan Jumlah Penduduk
5.	Mohammad Rifqi Muslim (2014) “Pengangguran Terbuka Dan Determinannya “	Variabel Independen : ketenagakerjaan, pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan pengeluaran pemerintah Variabel Dependen : Tingkat Pengangguran	Hasil menggambarkan “bahwa secara simultan variabel laju pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.Sedangkan secara parsial laju pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap	Perbedaannya : Variabel bebas nya ketenagakerjaan, pendidikan dan pengeluaran pemerintah. Lokasi dan waktu penelitian berbeda. Persamaannya : Menggunakan metode kuantitatif dan analisis data panel, variabel Perumbuhan ekonomi dan pengangguran.

			tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat” pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.	
6.	Ni Komang Sopianti dan A.A Ketut Ayuningsasi (2012) “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Pengangguran Di Bali “	Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Upah Minimum. Variabel Dependen : Jumlah Pengangguran	Secara simultan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Bali tahun 2004-2010. Sedangkan secara parsial tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Bali tahun 2004-2010, kemudian pertumbuhan ekonomi dan upah minimum tidak berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Bali tahun 2004-	Perbedaannya : Variabel bebasnya menggunakan tingkat inflasi kemudian Lokasi dan waktu penelitian berbeda. Persamaannya : Menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi berganda kemudian menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pengangguran.

			2010.	
7.	Ayudha Lindiarta (2014). “Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Inflasi, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Kota Malang (1996 – 2013)”	<p>Variabel Independen : Upah Minimum Kab/Kota, Inflasi dan Jumlah Penduduk</p> <p>Variabel Dependen : Pengangguran</p>	<p>Bahwa variabel UMK mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap variabel pengangguran dengan nilai sig t $(0,296) > \alpha = 0,05$, variabel inflasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel pengangguran dengan nilai sig t $(0,039) < \alpha = 0,05$, dan variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel pengangguran dengan nilai sig t $(0,025) < \alpha = 0,05$, sedangkan secara simultan variabel UMK, inflasi, dan jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan.</p>	<p>Perbedaannya : Menggunakan variabel inflasi, kemudian Lokasi dan waktu penelitian berbeda.</p> <p>Persamaannya : Menggunakan metode kuantitatif, menggunakan data sekunder, Menggunakan metode analisis regresi linier berganda kemudian menggunakan variabelupah minimum, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran.</p>
8.	Ronny Pitartono dan Banatul Hayato (2012). “ Analisis Tingkat Pengangguran Di Jawa Tengah	<p>Variabel Independen : Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, UMK Jateng dan</p>	<p>Variabel independen yang mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap variabel</p>	<p>Perbedaannya : Menggunakan variabel bebas tingkat inflasi kemudian Lokasi dan waktu penelitian</p>

	Tahun (1997-2010).	Laju Pertumbuhan PDRB. Variabel Dependen : Tingkat Pengangguran	dependen adalah jumlah penduduk dan upah minimum kabupaten / kota di Jawa Tengah, dimana variabel jumlah penduduk memiliki angka koefisien korelasi sebesar 0,755 sementara variabel upah minimum kabupaten / kota memiliki angka koefisien korelasi sebesar 0,878 yang berarti kenaikan jumlah penduduk, UMK akan menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran. Variabel tingkat inflasi dan laju pertumbuhan PDRB tidak signifikan berhubungan dengan tingkat pengangguran.	berbeda. Persamaannya : menggunakan metode kuantitatif, menggunakan analisis deskripsi data secara grafis, kemudian menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran.
9.	Yulia Pangastuti (2015) “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah “	Variabel Independen : PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pengangguran serta PAD. Variabel Dependen :	Menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif, sedangkan UMK, Pengangguran dan PAD memiliki	Perbedaannya : Menggunakan variabel PAD Lokasi dan waktu penelitian objek dari penelitian berbeda. Persamaannya : Menggunakan analisis

		Penyerapan Tenaga Kerja	hubungan yang positif. Dan variabel yang signifikan hanya pengangguran.	kuantitatif, menggunakan alat regresi linear berganda dan untuk variabelnya menggunakan variabel PDRB, UMK dan Pengangguran
10.	Putri RomhaDhoni, Dita Zamrotul Faizah dan Nada Afifah, (2018) “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta.	Variabel Independen : PDRB Daerah Variabel Dependen : Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi.	PDRB ADHK memiliki pengaruh dan namun tidak dengan angka pengangguran terbuka. Sedangkan PDRB ADHB tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada angka pengangguran terbuka. Data yang digunakan data sekunder dengan menggunakan teknik analisis jalur (<i>Path Analysis</i>).	Perbedaannya : Variabelnya menggunakan PDRB ADHB, menggunakan tehknik analisis jalur, kemudian Lokasi dan waktu penelitian objek dari penelitian berbeda. Persamaannya : Menggunakan analisis kuantitatif, Pengumpulan data adalah melalui studi pustaka, penelitian ini menggunakan data sekunder,. Variabel yang digunakan adalah PDRB ADHK , dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran didasari oleh Teori Pengangguran dalam Teori Klasik menjelaskan bahwa pengangguran yang dapat dicegah melewati sisi penawaran dan mekanisme harga yang berada di pasar bebas agar dapat menjamin adanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Artinya, pengangguran ini bisa terjadi karena adanya mis-alokasi dari sumber daya yang bersifat sementara dan kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator potensial dalam meneliti berpengaruhnya terhadap tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang. Artinya tingginya pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Banten mengalami peningkatan yang merupakan cerminan dari sektor yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Karena jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka angka pengangguran akan menurun dan tidak akan menyebabkan tingginya angka pengangguran di industri besar sedang. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi signifikan terhadap tingkat penangguran terbuka di industri besar sedang Kabupaten/Kota Banten.

Maka hubungan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda negatif terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, dimana pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran mempunyai hasil yang negatif.

Kemudian upah minimum mencerminkan pendapatan yang diterima oleh pekerja, dimana kenaikan upah minimum yang akan menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang. Tingkat pengangguran terjadi di Kabupaten/kota Provinsi Banten karena adanya tingkat upah, dimana dalam pemberian upah yang baik akan mendorong tenaga kerja untuk bekerja semakin produktif lagi. Maka dari itu semakin tingginya upah minimum Kabupaten/Kota Provinsi maka akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

Artinya hubungan tingkat upah di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Hal ini karena jika terjadinya penurunan dalam besarnya upah yang diberikan maka akan terjadi penurunan pada tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang.

Sedangkan jumlah penduduk akan memberikan permasalahan terhadap penambahan angka pengangguran. Karena jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang di Kabupaten/Kota Provinsi di Banten.

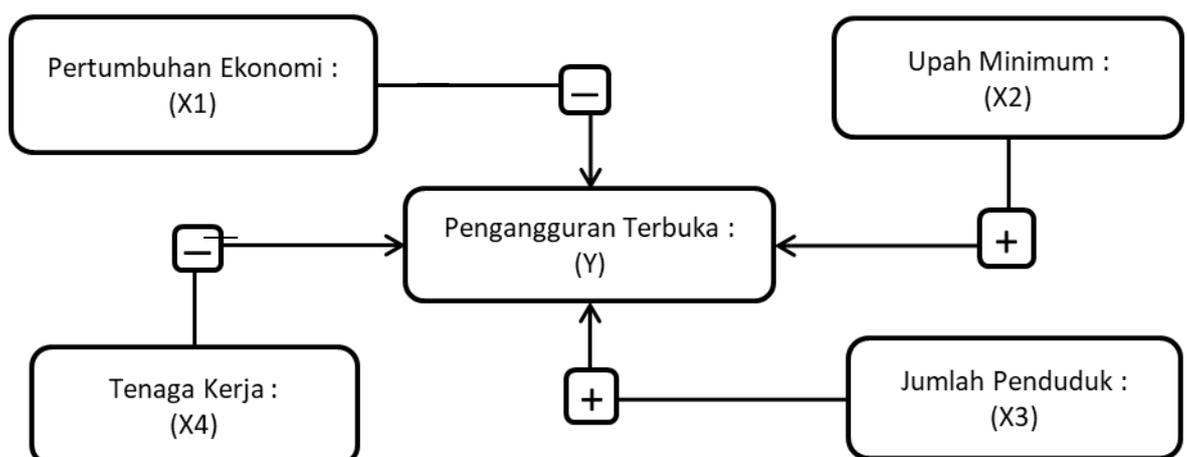
Maka hubungan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Dikarenakan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan, peningkatan yang ada ini

disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk asli di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten ataupun juga penduduk pendatang dari luar Provinsi Banten.

Sedangkan peran industri dalam pembangunan struktural pada perekonomian yang menjadi tolak ukurnya yang terpenting adalah jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri barang dan jasa.

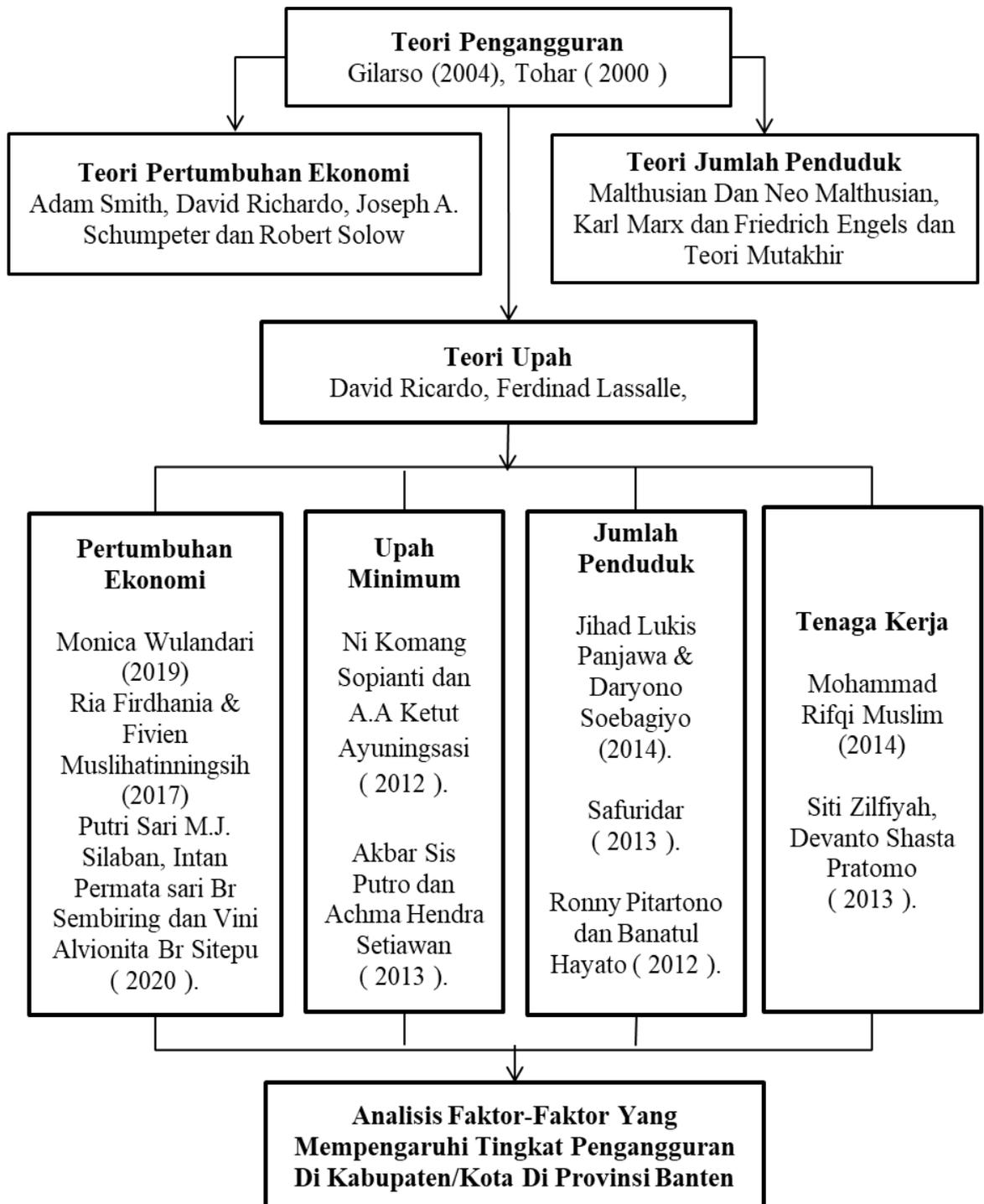
Maka hubungan jumlah tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten berpengaruh negatif karena semakin tingginya tingkat pertumbuhan industri, maka semakin tinggi nya tingkat pengangguran ekonomi. Oleh sebab itu kenaikan jumlah penyerapan tenaga kerja ini sangat membantu dalam mengurangi pengangguran.

Berdasarkan penjelasan diatas dan untuk memudahkan apa yang telah dijelaskan alur pemikiran pada penelitian ini, maka dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :



Sumber : Diolah Oleh Penulis

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 1



Sumber : Diolah Oleh Penulis

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 2

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang bersifat sementara atas masalah penelitian yang sudah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2010).

1. Diduga variabel “pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang Kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2010-2020.”
2. Diduga variabel “jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang Kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2010-2020.”
3. Diduga variabel “upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang Kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2010-2020.”
4. Diduga variabel “tenaga kerja sektor industri besar sedang berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di industri besar sedang Kabupaten/kota Provinsi Banten tahun 2010-2020.”